FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

Filsafat Negara
PLATO

PENGANTAR

Plato (427-347 sM) oleh banyak filosof dianggap sebagai filosof terbesar selama sejarah filsafat yang paling-paling disaingi oleh Aristoteles. Ia lahir di Athena dan di Athenalah ia kemudian mendirikan *Akademia*, sekolah filsafat tersohor yang baru ditutup oleh kaisar Justinianus pada tahun 529 M. Namun waktu Plato menjadi dewasa, Athena sudah melewati masa gemilangnya. Sesudah perang Peloponesos (431-404 sM) di mana Athena kalah, Athena dikuasai oleh sebuah konsorsiun yang terdiri atas lebih dari 30 orang diktator. Kehidupan masyarakat kacau dan orang kehilangan orientasi. Itulah titik tolak filsafat Plato.

IDEA KEADILAN

Dalam situasi itu Plato mencari kembali orientasi untuk masyarakat. Dalam rangka ini kita mengerti ajarannya tentang *idea-idea*, realitas-realitas rohani abadi yang merupakan kenyataan yang sebenarnya, sedangkan apa yang dialami di dunia ini, hanyalah semacam cerminan idea-idea yang seakan-akan tercetak ke dalam materi. Orang akan menemukan arah kehidupan apabila ia berorientasi pada idea-idea.

Idea paling penting untuk kehidupan bersama adalah ***keadilan***. Masyarakat akan berjalan dengan baik apabila ditata dengan adil. Apa itu keadilan?

Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus memperhatikan hubungan antara masyarakat dan manusia. Masyarakat oleh Plato dipahami sebagai *manusia dieja besar*. Jadi sebagaimana manusia terdiri atas bagian-bagiannya, begitu pula masyarakat. Nah, manusia itu sehat dan dalam keadaan baik, apabila bagian-bagiannya menjalankan fungsi mereka masing-masing. Masing-masing melakukan kegiatan, masing-masing, misalnya, mata, tangan, kaki, perut, mempunyai kegiatan yang khas, dan dengan melakukannya masing-masing bagian tubuh manusia mewujudkan kesehatan seluruh tubuh.

Begitu pula masyarakat akan beres apabila masing-masing bagiannya menjalankan tugasnya masing-masing. Yang

satu memimpin, yang satunya menjaga keamanan, yang lain lagi menghasilkan kebutuhan hidup bagi semua, semua menurut kecakapan dan kemampuannya masing-masing. Tubuh masyarakat akan sehat, apabila semua anggota masyarakat menjalankan fungsi mereka. Itulah hakekat ***keadilan*** menurut Plato. Masyarakat ditata dengan adil apabila semua warga masyarakat menjalankan fungsi yang khas bagi masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Jadi bagi Plato keadilan bukanlah sekadar keadaan di mana semua memperoleh apa yang menjadi hak mereka, melainkan tatanan seluruh masyarakat yang selaras dan seimbang. Masyarakat yang adil bagi Plato adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan yang harmonis, di mana masing-masing anggota memperoleh kedudukan sesuai dengan kodrat dan tingkat pendidikan mereka. Sebagaimana manusia sehat dan utuh apabila semua bagian jiwanya berada dalam hubungan selaras satu sama yang lain, begitu halnya negara.

NEGARA YANG TERTATA DENGAN ADIL

Menurut Plato tubuh manusia terdiri atas tiga bagian utama: Kepala yang memuat *akal budi* (*logistikon*), dada yang memuat keberanian dan perasaan-perasaan kuat lain (*thymoeides*), dan perut yang memuat nafsu (*thymaitikon*).

Begitu pula negara, atau lebih tepat: *kota* (*polis*) harus terdiri atas tiga kelompok orang. Paling bawah, padanan *thymaitikan*, adalah para *penghasil makanan*, di mana termasuk semua yang melalui pekerjaan menghasilkan apa yang dibutuhkan manusia. Itulah rakyat biasa. Di atasnya adalah *"para penjaga"*, mereka yang harus menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dan melindunginya terhadap musuh dari luar. Para penjaga itu adalah padanan *thymoeides*. Negara dipimpin oleh *raja,* seperti tubuh oleh *logistikon*, yang, karena mempimpin memerlukan wawasan luas, harus merupakan *filosof.* Itulah ajaran termasyur Plato mengenai raja filosof.

Golongan pertama adalah mereka yang bekerja agar barang kebutuhan manusia dapat tersedia: Para petani, tukang, pedang, buruh, pengemudi kereta, dan pelaut. Karena mereka hanya memahami kepentingan mereka sendiri, mereka harus diatur demi kepentingan umum oleh para penjaga. *Para penjaga,* golongan kedua, seluruhnya mengabdikan diri pada kepentingan umum. Maka mereka harus hidup dengan cara yang tidak mengizinkan perkembangan kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka tidak boleh berkeluarga, wanita dan anak dimiliki bersama, mereka tidak mempunyai hak milik pribadi, mereka hidup, makan dan tidur dalam asrama. Mereka perlu diberi pendidikan intensif sejak umur dua tahun, dengan kosentrasi pada mata kuliah-mata kuliah yang mengembang-

kan tertib dan kebijaksanaan: filsafat, gimnastik dan musik (sedangkan puisi terlarang). Perempuan pun dapat menjadi penjaga (Plato termasuk sangat sedikit filosof yang mengakui kesamaan harkat perempuan dengan laki-laki).

Para pemimpin negara diambil dari antara para penjaga, dari mereka yang paling mendalami filsafat. Dengan lain kata, negara harus *dipimpin oleh para filosof*. Filosof adalah orang yang sanggup melihat *idea-idea*, khususnya ia memahami apa yang adil.

CITA-CITA DAN REALITAS

Plato sangat menyadari bahwa negara ideal yang dilukiskannya dalam buku utama filsafat politik *Politeia*, tidak mungkin terlaksana dalam realitas. Jadi *monarki,* negara yang dipimpin oleh seorang raja filosof, sangat tidak mungkin akan nyata-nyata terjadi. Dalam kenyataan negara terbaik, misalnya sebuah monarki, lama-kelamaan mesti merosot. Kemerosotan itu terjadi dalam empat langkah.

Pertama, *monarki* diganti oleh *timokrasi* (dari *timeia,* hormat, dan *kratein,* berkuasa). Kalau dalam *monarki* yang berkuasa adalah akal budi (sang filosof), maka dalam *timokrasi* yang berkuasa adalah hasrat akan pujian atau keadaan terhormat sebagaimana khas bagi para bangsawan. Dalam timokrasi

berkuasalah keberanian (thymoeides). Namun *timokrasi* pun tidak bertahan dan akan diganti oleh *oligarki* (dari *oligos*, yang sedikit), kekuasaan "yang sedikit", di mana yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai uang. Jadi bagi Plato oligarki itu sama dengan plutokrasi. Dalam Oligarki yang berkuasa adalah nafsu (*thymaitikon*) yang masih ditertibkan oleh kompetensi dalam bidang ekonomi. Tetapi oligarki menimbulkan rasa iri hati rakyat, maka rakyatlah yang merebut kekuasaan, mewujudkan *demokrasi*, "kekuasaan rakyat".

Demokrasi bagi Plato adalah kekuasaan kebebasan total, keadaan anarkis yang kacau balau. Sekarang semua nafsu dan keinginan sudah lepas bebas dan berkuasa secara campur baur. Plato membandingkan rakyat itu dengan seorang kapten perahu yang hampir tulis dan buta, yang didesak-desak terus oleh para kelasinya yang mau memberontak. Atau dengan seekor binatang raksasa buas yang dikelilingi oleh kaum *Sofis* (kaum intelektual waktu itu) yang mempermainkannya dan berusaha untuk membuatnya berjalan dalam arah yang mereka kehendaki. Tidak lama kemudian demokrasi disingkirkan oleh kediktatoran satu orang yang berhasil mengalahkan semua napsu lain, yaitu *tyrannis*. Si calon *tiran* mulai sebagai pemimpin massa melawan kekayaan, tetapi sesudah ia berkuasa yang melakukan pembunuhan dan mengikuti hawa napsu

sampai ia dan negara hancur sendiri. Hanya ada harapan akan seorang raja yang akan mengakhiri kegilaan itu.

NEGARA TERBAIK KEDUA



Pesimisme Plato mengenai kemungkinan bahwa betul-betul terbentuk negara yang dipimpin oleh para filosof membuat Plato tua, dalam buku *Nomoi* ("Undang-undang") untuk mengembangkan konsepsi negara terbaik kedua. Dalam negara itu pengertian hidup sang filosof diganti dengan sebuah sistem peraturan kaku. *Monarki* diganti oleh *nomokrasi* (kekuasaan undang-undang). Menurut Plato, kebijaksanaan negarawan sejati berbanding dengan undang-undang seperti seniman dengan paham-paham hidupnya dengan peraturan bagi mereka yang belajar ilmu seni.

Paham ini lebih moderat dan kompromistik. Para penjaga boleh berkeluarga. Perbudakan –yang dalam *Politeia* tidak disebut– dianggap hal biasa. Sekarang Plato mengembangkan ajaran klasik tentang tiga bentuk kenegaraan baik yang masing-masing ada padanan yang buruk. Yaitu: Monarki, aristokrasi dan demokrasi, yang padanannya adalah *tyrannis* (kediktatoran), oligarki dan demokrasi tanpa hukum.

TANGGAPAN

Karl Popper (*The Open Society and its Enemies*) menggambarkan Plato sebagai sang ideolog yang mau memimpin negara menurut *idea-idea* abstrak – yang dilawan Aristoteles yang berpandangan pragmatis. Tetapi penafsiran Popper ini dianggap tidak kena pada Plato. Memang, menyusun konsep kenegaraan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sama sifatnya dengan *para dewa*, sebagaimana diakui Plato sendiri, mesti menjadi godaan untuk menyusunnya menurut sebuah ideologi apriori. Tetapi Plato sangat sadar bahwa konsepsinya tidak dapat praktekkan. Ia berpendapat bahwa perlu manusia tahu bagaimana kehidupan bersama seharusnya. Nah itulah yang dilakukan oleh Plato. Sedangkan dalam kenyataan, meskipun Plato berpendapat bahwa "pemimpin baik" lebih penting daripada "undang-undang baik" –paham yang ditolak Aristoteles,- namun ia sadar bahwa yang nyata mungkin adalah "negara terbaik kedua". Pandangan seorang realis.



PERTANYAAN-PERTANYAAN

1) Atas dasar konsepsi keadilan yang mana Plato menuntut agar negara dipimpin oleh para filosof?

2) Dapatkah diperlihatkan bahwa Plato sebenarnya mempunyai pemikiran tentang negara yang cukup realistik?

PUSTAKA:

Copleston, Frederick. *A History of Philosophy*, Vol. 1: Greece and Rome. London: Burns & Oates, 1956-1974.

Franz Magnis-Suseno 1997, *13 Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato Sampai dengan Nietzsche*, Yogyakarta: Kanisius, 214 hal.

----- 1987, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia.

Rapar, J.H. 1988a, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Pers.

